

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menegaskan bahwa ketahanan pangan mencakup ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang harus diwujudkan hingga tingkat rumah tangga. Ketahanan pangan tidak hanya dipandang sebagai pemenuhan kebutuhan dasar manusia, tetapi juga menjadi fondasi stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, upaya menjaga ketahanan pangan menuntut sinergi antara sektor produksi, distribusi, hingga pemanfaatan di tingkat rumah tangga.

Indonesia dengan jumlah penduduk yang terus meningkat menghadapi tantangan serius dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Pertumbuhan penduduk yang pesat, perubahan iklim, serta ketergantungan terhadap impor menjadi faktor utama yang memengaruhi stabilitas pangan. Jefferson et al. (2025, hlm. 1327) menegaskan bahwa dinamika demografis dan perubahan iklim menjadi tekanan besar terhadap produksi pangan domestik, sehingga upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional sering terkendala. Hal ini diperkuat oleh Putra & Sugianingrat (2025, hlm. 442-443) yang menunjukkan bahwa perubahan iklim telah mengurangi kuantitas dan kualitas produksi pangan, sementara kebutuhan pangan terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Kondisi tersebut membuat Indonesia masih mengandalkan impor untuk menjaga keseimbangan pasokan pangan. Efrina (2025, hlm. 60-61) bahkan menemukan bahwa impor beras dari Thailand menjadi strategi pemerintah untuk menutup kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pangan, terutama ketika produksi dalam negeri terganggu oleh iklim dan keterbatasan lahan. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Indonesia bukan hanya soal produksi, tetapi juga terkait dengan distribusi, akses, dan keterjangkauan pangan yang adil bagi seluruh masyarakat.

Dalam menghadapi masalah tersebut, keterlibatan masyarakat lokal, khususnya perempuan, menjadi kunci penting. Perempuan di pedesaan memegang peran ganda, baik sebagai produsen pertanian maupun pengelola pangan keluarga. Keterlibatan mereka berpengaruh langsung terhadap ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Oleh sebab itu, program pemberdayaan perempuan dalam sektor pertanian menjadi salah satu fokus pemerintah. Kelompok Wanita Tani (KWT) hadir sebagai bentuk nyata dari kebijakan tersebut. KWT tidak hanya mendorong perempuan untuk lebih produktif, tetapi juga menjadi wadah untuk meningkatkan kapasitas, solidaritas sosial, serta memperkuat kemandirian ekonomi rumah tangga. Radita dan Hapsari (2025, hlm. 3176, 3179) menegaskan bahwa KWT bukan sekadar sarana teknis produksi, melainkan instrumen pemberdayaan perempuan yang mampu memperkuat kesetaraan dalam ruang sosial-ekonomi pedesaan, sehingga peranannya sangat strategis dalam transformasi gender di sektor agraris.

Dalam konteks Jawa Barat, permasalahan ketahanan pangan semakin memperlihatkan urgensi pemberdayaan masyarakat, termasuk KWT. Meskipun provinsi ini dikenal sebagai salah satu lumbung padi nasional, tantangan ketahanan pangan tetap muncul. Penelitian Faidah et al. (2024, hlm. 530–531) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 produksi beras Jawa Barat turun 169 ribu ton atau setara 3,11%, yang memicu kelangkaan beras dan lonjakan harga di pasar grosir maupun eceran. Situasi ini menegaskan bahwa potensi produksi pangan yang besar tidak otomatis menjamin ketahanan pangan masyarakat jika stabilitas produksi tidak terjaga dan distribusi tidak merata. Kerentanan ini lebih terasa pada rumah tangga dengan pendapatan rendah yang kesulitan menjaga akses pangan ketika harga melonjak. Ketergantungan masyarakat pada satu komoditas utama, yaitu beras, juga memperbesar risiko kerawanan pangan ketika produksi terganggu. Artinya, permasalahan pangan di Jawa Barat tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga sosial-ekonomi. Dalam konteks ini, pemberdayaan perempuan melalui KWT dapat menjadi bagian dari solusi untuk memperkuat diversifikasi pangan, mengurangi ketergantungan pada satu komoditas, sekaligus meningkatkan daya tahan keluarga dalam menghadapi gejolak harga.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Tasikmalaya yang dikenal sebagai

daerah agraris dengan potensi pertanian besar. Namun, potensi tersebut tidak otomatis menjamin ketahanan pangan keluarga. Penelitian Apiati et al. (2022, hlm. 44) menunjukkan bahwa rumah tangga petani di Kecamatan Cigalontang, khususnya Kampung Kawunglancar, mengalami kerentanan pangan akibat kawasan rawan gerakan tanah yang membatasi produksi dan menurunkan pendapatan. Hal ini menegaskan bahwa potensi agraris tanpa dukungan kelembagaan dan pemberdayaan komunitas dapat melahirkan kerentanan baru. Ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh hasil panen, tetapi juga oleh kemampuan rumah tangga mengelola sumber daya, membangun jaringan sosial, dan mengakses dukungan pemerintah. Dalam konteks ini, KWT berperan sebagai wadah pemberdayaan perempuan tani yang memperkuat dimensi sosial-ekonomi keluarga.

Perkembangannya menunjukkan bahwa KWT tidak lagi terbatas pada pemanfaatan pekarangan, tetapi bergerak menuju pertanian terpadu yang mengintegrasikan tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan secara berkelanjutan. Oelviani dan Utomo (2015, hlm. 1197) menemukan bahwa model ini mampu meningkatkan diversifikasi pangan sekaligus menambah pendapatan dan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Di Tasikmalaya, Rustiana dkk. (2025, hlm. 65–66) juga menunjukkan bahwa KWT berperan dalam produksi, pengelolaan, hingga distribusi hasil, sehingga memperkuat kemandirian pangan dan pemberdayaan perempuan di tingkat lokal. Dukungan modal sosial seperti gotong royong dan solidaritas menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan kelompok meskipun menghadapi keterbatasan modal dan akses pasar.

Salah satu KWT yang menarik perhatian adalah KWT Melati di Kampung Sarengkol, Desa Sukagalih, Kecamatan Sukaratu. Kelompok ini telah mengembangkan model pertanian terpadu yang mengintegrasikan budidaya hortikultura, pemeliharaan ternak kecil, dan pengelolaan pupuk organik berbasis sumber daya lokal. Model integratif ini terbukti meningkatkan ketersediaan pangan keluarga, mengurangi ketergantungan pada pasar eksternal, serta memperkuat daya tahan ekonomi rumah tangga. Namun demikian, KWT Melati juga menghadapi kendala, antara lain keterbatasan modal usaha, keterampilan teknis anggota yang belum merata, serta akses pemasaran yang masih terbatas. Di sisi lain, komitmen

kolektif, semangat gotong royong, serta orientasi pada peningkatan kesejahteraan keluarga menjadi kekuatan penting yang menopang keberlanjutan program.

Dengan melihat dinamika tersebut, jelas bahwa pemberdayaan KWT melalui pendekatan pertanian terpadu relevan untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga di Tasikmalaya. Pemberdayaan ini tidak hanya menjawab tantangan lokal, tetapi juga berkontribusi pada isu nasional tentang pangan dan kesetaraan gender. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti ketahanan pangan dari sisi produksi, tetapi juga melihat bagaimana pemberdayaan perempuan tani melalui pertanian terpadu dapat menjadi strategi sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, kajian ketahanan pangan selama ini lebih banyak berfokus pada aspek produksi, distribusi, dan ketersediaan pangan pada level makro, sedangkan penelitian pemberdayaan perempuan di sektor pertanian cenderung menekankan partisipasi dan peningkatan kapasitas tanpa mengkaji secara mendalam keterkaitannya dengan model pertanian terpadu sebagai suatu sistem yang terintegrasi. Selain itu, studi mengenai Kelompok Wanita Tani umumnya berhenti pada capaian hasil seperti peningkatan produksi atau pendapatan, belum secara komprehensif menganalisis bagaimana pertanian terpadu berfungsi sebagai proses pemberdayaan yang mengubah pola pengambilan keputusan dalam keluarga, memperkuat posisi tawar perempuan, serta menjamin keberlanjutan sosial ekonomi kelompok dalam konteks lokal tertentu. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami secara utuh hubungan antara pendekatan pertanian terpadu dan proses pemberdayaan perempuan tani dalam memperkuat ketahanan pangan keluarga, khususnya pada konteks spesifik Tasikmalaya, yang menjadi fokus penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diberi judul: “Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani melalui Program Pertanian Terpadu dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Keluarga (Studi pada KWT Melati Kampung Sarengkol, Desa Sukagalih, Kabupaten Tasikmalaya)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah: Bagaimana proses pemberdayaan KWT melalui program pertanian terpadu dalam ketahanan pangan keluarga di Kampung Sarengkol, Desa

Sukagalih, Kec. Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya?

1.3 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan batasan dan kejelasan mengenai konsep-konsep utama yang digunakan agar tidak terjadi perbedaan penafsiran. Penelitian ini dilakukan di Kampung Sarengkol, Desa Sukagalih, Kabupaten Tasikmalaya, yang merupakan wilayah dengan aktivitas pertanian terpadu dan keterlibatan aktif Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Adapun istilah yang didefinisikan meliputi.

1.3.1 Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani

Pemberdayaan KWT merupakan proses peningkatan kapasitas perempuan melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan perluasan akses sumber daya pertanian. Proses ini meliputi pembukaan kesempatan berpartisipasi, penguatan pengetahuan dan keterampilan, perlindungan peran perempuan, dukungan berkelanjutan, serta pemeliharaan kemandirian kelompok dalam mendukung kesejahteraan keluarga.

1.3.2 Program Pertanian Terpadu

Program pertanian terpadu merupakan pendekatan pengelolaan usaha tani yang dilakukan secara holistik dengan mengintegrasikan berbagai kegiatan pertanian, seperti budidaya tanaman pangan dan hortikultura dalam satu sistem yang saling mendukung. Dalam penelitian ini, program pertanian terpadu dipahami sebagai strategi yang dilaksanakan KWT untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani sekaligus memperkuat ketahanan pangan keluarga.

1.3.3 Ketahanan Pangan Keluarga

Ketahanan pangan keluarga dalam penelitian ini diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bergizi, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh anggota keluarga. Indikatornya mencakup ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, serta pemanfaatan pangan yang mendukung kesehatan dan kualitas hidup keluarga. Fokus penelitian menekankan pada peran pemberdayaan KWT dan program pertanian terpadu dalam memperkuat dimensi ketahanan pangan keluarga tersebut.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT) melalui program pertanian terpadu dalam meningkatkan ketahanan pangan keluarga di Kampung Sarengkol, Desa Sukagalih, Kec. Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, dengan menelaah bentuk, strategi, dan dampaknya terhadap penguatan ketahanan pangan keluarga.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan 3 (tiga) manfaat utama, yaitu sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang pemberdayaan masyarakat, gender, dan ketahanan pangan keluarga. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur mengenai peran Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam mengimplementasikan program pertanian terpadu sebagai strategi penguatan ketahanan pangan keluarga.

1.5.2 Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah, penyuluh pertanian, serta pengurus KWT dalam merancang dan mengimplementasikan program pemberdayaan perempuan yang lebih efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat diaplikasikan secara langsung untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga melalui strategi pertanian terpadu di tingkat lokal.

1.5.3 Manfaat Empiris

Penelitian ini memberikan gambaran faktual mengenai dinamika pemberdayaan KWT Melati di Kampung Sarengkol, Desa Sukagalih, Kabupaten Tasikmalaya. Temuan empiris ini dapat menjadi pijakan untuk penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dan dinamis, sekaligus menjadi rujukan dalam mengembangkan model pemberdayaan yang lebih holistik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.